

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Depok: Rajawali Pers

Atmosudirjo, Prajudi. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia
Indonesia

Hafidz Arsyad, Jawade. 2003. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum
Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada

Husein, Yunus. 2008. *Kerugian Negara Dalam Tipikor*. Jakarta: Koran Seputar
Indonesia

Mochtar, M. Akil. 2006. *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan
Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.

Muchsan. 1994. *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara dan
Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Saidi, Muhammad Djafar. 2008. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Sjarif, Amiroeddin. 1982. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Ghalia
Indonesia

Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*.

Jakarta: Prestasi Pustaka

Suryanajaya, A.Y. 2008. *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah, dan Penyelesaian*. Jakarta: Eko Jaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-481/A/JA/09/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-04/S.TPKN/10/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pembentukan Ad-Hock.

C. Karya Ilmiah

Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

D. Internet

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. *Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana)*. (<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana#sthash.m0TKbKQ4.dpuf>, diakses 4 Februari 2021)

Kejaksaan Republik Indonesia, *Profil Pimpinan*. (https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=9, diakses pada 23 Agustus 2021)

